

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN BANJIR KOTA SAMARINDA

Joni Sinatra Ginting¹, Bambang Irawan², Daryono³

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

² Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: <mailto:joesinatra68@gmail.com>

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the Samarinda City Flood Anticipation and Handling Policy based on the 2021-2026 RPJMD. And to identify what are the inhibiting and supporting factors. This research is a descriptive qualitative approach that aims to describe the implementation of flood control policies in Samarinda City. This research will obtain information about how the program's performance is carried out through this research. The results showed that the Samarinda City Flood Anticipation and Handling Policy in the communication aspect had been carried out well and understood by all components and increased public awareness in participating in the policy. The policy has been implemented optimally in the sort of resources but is stilartnstrained by financial resources. In Respect of dis, that by the leadthatactor's en carried out well and has become capital. There is support from all stakeholders/actor policies for anticipating and handling floods in Samarinda City. In the organizational structure formed based on their respective roles, SOPs in response have also been made. When disaster strikes. Strengthening the roles and responsibilities of OPD has also been attached to their units in the event of a disaster. Meanwhile, the inhibiting factors, namely the existence of territorial barriers, limited land in some areas to build retention ponds—inadequate funding/financial factors in accelerating flood prevention. Then the supporting element is the support from the community, the Provincial Government, and the Central Government in implementing the policy.

Keywords: Policy Implementation, Flood, Samarinda.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Antisipasi Dan Penanganan Banjir Kota Samarinda berdasarkan RPJMD 2021-2026. Serta untuk mengidentifikasi hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan pengendalian banjir di Kota Samarinda sehingga melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi program tersebut dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Antisipasi Dan Penanganan Banjir Kota Samarinda pada aspek komunikasi telah dilakukan dengan baik dan dipahami oleh semua komponen serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Pada aspek sumberdaya telah kebijakan telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terkendala pada sumberdaya keuangan. Pada aspek disposisi yang dilakukan oleh aktor utama telah dilakukan dengan baik dan menjadi modal serta adanya dukungan dari semua stakeholder/actor kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda dan pada aspek struktur organisasi telah dibentuk berdasarkan peran masing-masing, SOP dalam penanggulangan juga telah dibuat ketika terjadi bencana. Penguatan peran dan

tanggungjawab OPD juga telah melekat dengan unit masing-masing ketika terjadi bencana. Sementara itu untuk faktor penghambat yaitu adanya hambatan teritorial, keterbatasan lahan pada beberapa wilayah untuk membangun kolam retensi. Faktor pendanaan/keuangan yang belum memadai dalam melakukan percepatan penanggulangan banjir. Kemudian untuk faktor pengukung adalah telah adanya dukungan dari masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Banjir, Samarinda.

Pendahuluan

Salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap bencana banjir adalah Kota Samarinda, karena merupakan kota yang dilintasi oleh satu sungai terpanjang di Indonesia dan menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan menurut data BPS (2021) jumlah penduduk Kota Samarinda pada bulan September 2020 sebanyak sebanyak 827.994 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 sebesar 1,26 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, laju pertumbuhan pemukiman juga cukup tinggi dan berdampak pada semakin terbatasnya daerah resapan air yang juga lingkungan.

Selaras dengan pertumbuhan kota yang cukup pesat tersebut, dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dikatakan bahwa bencana banjir yang terjadi, indeks resiko tinggi terdapat di kecamatan Samarinda Kota, sisi timur kecamatan Sungai Pinang, bagian tengah kecamatan Samarinda Utara, pada dataran banjir Sungai Karang Mumus kemudian terdapat disebagian Samarinda Seberang, Sambutan, Palaran, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, barat laut Samarinda Ilir dan sebagian kecil tenggara Samarinda Ilir (Samarinda, 2021).

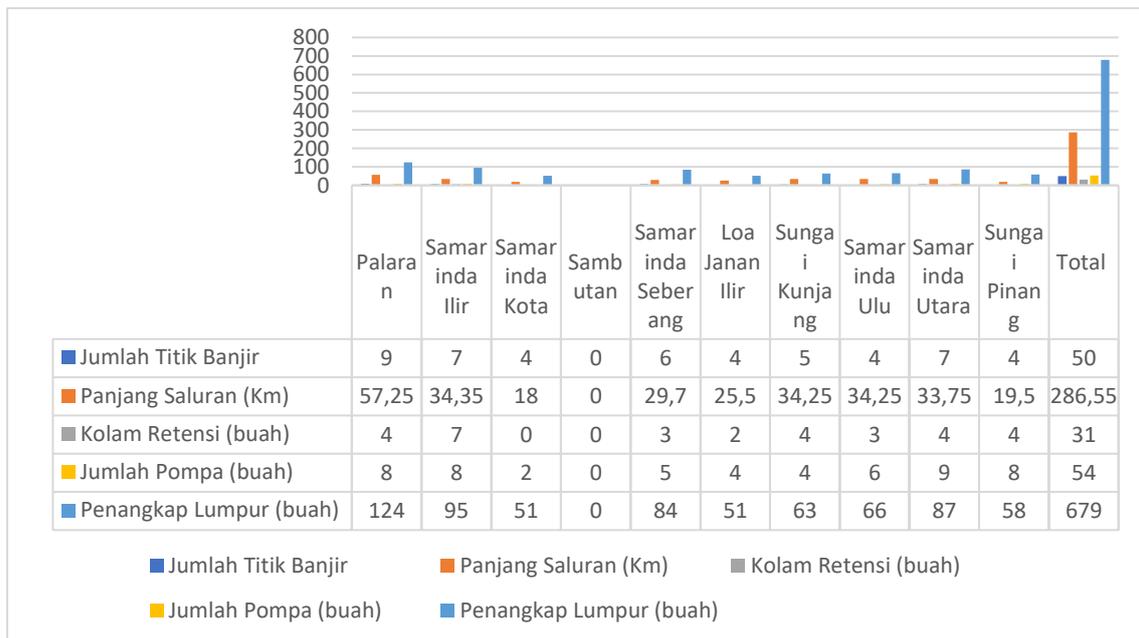
Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mengatasi banjir sudah sejak lama dilakukan, berdasarkan hasil penelitian Sukandar (2017) mengatakan bahwa sejak tahun 2017 Walikota menginstruksikan kepada seluruh aparaturnya Pemkot Samarinda untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir mulai dari penanganan Banjir di Bendungan Benanga, Sungai Karang Mumus, kepastian jadwal percepatan penanganan masalah lahan & sosial, serta pembentukan Tim Pengendalian Banjir Kota Samarinda. Kondisi tersebut merupakan salah satu model disposisi dalam implementasi kebijakan dengan melakukan instruksi kepada stakeholder dan melibatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengambil langkah cepat dalam penanggulangan banjir di Kota Samarinda. Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Masterplan Samarinda *Smart City* tertuang sasaran utama dalam rencana tersebut yaitu terlaksananya pengendalian banjir serta adanya relokasi kawasan tepian sungai karang mumus yang menggunakan 3 pilar pembangunan berkelanjutan dengan 6 pilar *Smart City* (Walikota, 2018). Namun hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019, peran pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kota Samarinda masih dipertanyakan oleh masyarakat (Mym, 2019), selain itu aspirasi warga berfokus pada penanggulangan banjir pada saat reses anggota DPRD Kota Samarinda (KalimantanTV, 2021).

Dari gambaran di atas, tantangan yang telah dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda serta upaya yang telah dilakukan akan dapat menjadi pembelajaran penting untuk menyusun perencanaan strategis yang lebih baik dan efektif dimasa

yang akan datang. Namun perlu mempertimbangkan beberapa kelemahan dalam implementasi sebelumnya, sebagaimana menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana (2009) mengatakan bahwa “kelemahan dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Indonesia disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas, peraturan perundang-undangan, terutama di daerah masih terbatas serta pendanaan penanggulangan bencana masih sangat tergantung APBN dan APBD”.

Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas penanggulangan masalah banjir. Untuk itu upaya evaluasi dan pembenahan program yang telah dilakukan sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario berupa Masterplan Penanganan Bencana Banjir Tahun 2016-2035 (20 tahun). Dokumen induk tersebut, merupakan agenda program kegiatan tertuang dalam RPJMD (2021-2026) untuk menjalankan masterplan tersebut. Langkah yang diambil saat ini adalah “melakukan perbaikan saluran sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir. Untuk lebih jelasnya terlihat pada infografis 1 berikut ini.

Gambar 1
Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir Kota Samarinda



Sumber : Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Berdasarkan data pada infografis di atas, tergambar bahwa program yang akan akan dijalankan yaitu meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisienkan sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi di beberapa kelurahan, pengadaan pompa dan penangkap lumpur, penanganan banjir di area Sub DAS Sungai Karang Mumus (SKM), dengan revitalisasi bantaran SKM serta normalisasi SKM serta pembangunan pintu air dan rumah pompa Sungai Karang Mumus.

Berbagai strategi dan langkah tindak yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan melibatkan komponen baik eksternal maupun internal organisasi namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Dalam tingkatan ini kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan namun juga memiliki hubungan dengan dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebaik apapun suatu kebijakan tidak akan dapat dirasakan manfaatnya jika tidak di implementasikan atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan *outcome* atau yang diharapkan dari kebijakan itu, sebagaimana pendapat (Whitford, 2007). Oleh karena itu penelitian ini akan menekankan pada aspek implementasi kebijakan sebagaimana pendapat Edward III (1980) bahwa kunci sukses implementasi kunci sukses implementasi terletak pada kemampuan komunikasi pemerintah, optimalisasi sumberdaya yang digunakan, adanya struktur birokrasi serta disposisi.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, sebagaimana menurut Dunn dalam Winarno (2002) bahwa proses kebijakan publik meliputi “penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”. Dari langkah tersebut, implementasi kebijakan termasuk aspek dari proses kebijakan dikarenakan implementasi merupakan wujud dari realisasi perumusan kebijakan. Sementara itu membatasi implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2002). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang akan mendukung pelaksana kebijakan, unsur-unsur pelaksana kebijakan tersebut adalah elemen penting bagi berhasilnya suatu kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1983) “Pelaksanaan kebijakan pemerintah biasanya terpaut sejumlah aktor dalam berbagai kedudukan. Hal yang penting disini adalah perbedaan antara pelaksana kebijakan dan obyek kebijakan. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu atau lain cara dibebankan dengan penggunaan sarana organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para pelaksana dan pembagian tugas masing-masing”. Dari pengertian tersebut, berarti bahwa implementasi kebijakan umumnya diserahkan kepada lembaga pemerintahan dalam berbagai tingkatan hingga pada tingkatan paling rendah. Namun demikian obyek dari kebijakan adalah orang-orang atau kelompok terhadap siapa yang ditujukan oleh kebijakan itu. Apa yang terjadi pada

tahap implementasi akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan dan sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam hal merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan secara tepat pelbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasi. Selain itu juga, tahap implementasi adalah salah satu tahap proses kebijaksanaan publik yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan Edward III (1980). Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sebatas tindakan birokrasi yang bertanggung jawab, namun juga terhubung dengan jaringan kekuatan politik dan sosial ekonomi. Sehingga pada akhirnya berdampak pada hal yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

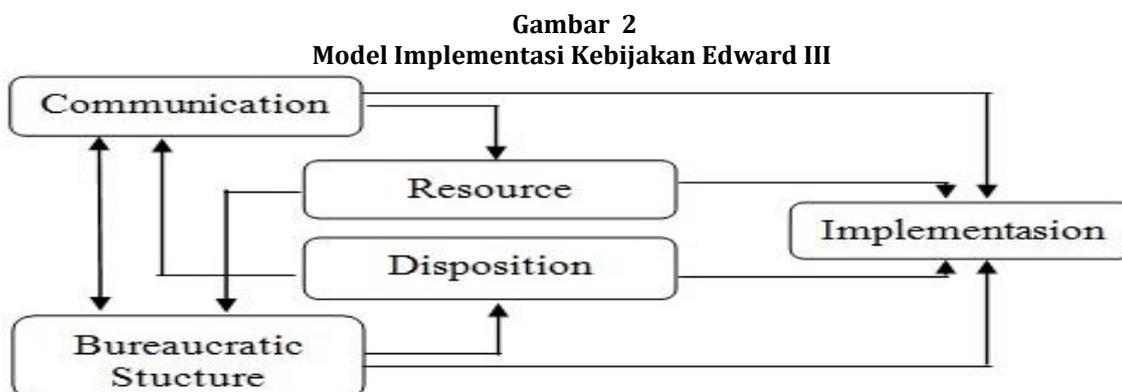
Berdasarkan beberapa pandangan yang telah diuraikan di atas, implementasi dapat ditarik beberapa makna yaitu bahwa kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut sikap Birokrasi dan badan lain yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program/agenda yang telah disusun, namun secara luas juga menyangkut jaringan kekuatan politik dan ekonomi sosial yang berpengaruh terhadap semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implementasi Kebijakan Model Edward III

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi, komunikasi diperlukan dalam menyampaikan isi kebijakan kepada para pelaku kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan untuk mencapai tujuannya.
- 2) Sumberdaya
Faktor sumberdaya manusia juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya dimaksud terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan serta sumberdaya kewenangan.
- 3) Disposisi
Disposisi adalah keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh dalam mencapai tujuan tertentu.
- 4) Struktur Birokrasi
Terdapat 6 karakteristik birokrasi berdasarkan pengamatan di Amerika yaitu : “
 - a) birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
 - b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
 - c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda;
 - d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas;
 - e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati;
 - f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut.



Sumber : Widodo (2010)

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat menggambarkan problematika yang diteliti dan dianalisis dengan model analisis interaktif menurut Miles et al., (2014).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Antisipasi Dan Penanganan Banjir Kota Samarinda

Komunikasi

Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa : “komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan pelaku kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka siapkan dan kerjakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapan”. Berdasarkan hal tersebut dalam kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda telah menjadi program prioritas Walikota Samarinda Samarinda karena Program unggulan ini salah satu dukungan terhadap terhadap visi dan misi serta telah dituangkan dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 yaitu “Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern”. Berdasarkan hal tersebut, temuan lapangan dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda, Pemerintah Kota telah melaksanakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi kebijakan. Kondisi tersebut dilakuka oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan sosialisasi yang memanfaatkan media elektronik, media sosial, radio, mulai dari yang bersifat pencegahan (preventif) yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai karang humus untuk dapat melakukan relokasi secara mandiri ke wilayah yang lebih aman dari dampak bencana banjir, sampai dengan penanganan dampak dari akibar banjir (kuratif) yaitu terkait ketika terjadi bencana banjir yang melanda Kota Samarinda.

Dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda program penanganan bencana Banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari masterplan perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Agenda kebijakan dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda yaitu meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisienkan sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi di beberapa kelurahan, pengadaan pompa dan penangkap lumpur, penanganan banjir di area Sub DAS Sungai Karang Mumus (SKM), dengan revitalisasi bantaran SKM serta normalisasi SKM. Pembangunan pintu air dan rumah pompa Sungai Karang Mumus. Kemudian ada program khusus yang dibuat seperti pembuangan parapet pada kelurahan Air Hitam, Karang Asam, Sungai Keledang, Sungai Karang Mumus, Bendungan Lempake dan Sungai Mahakam yang direncanakan akan diselesaikan selama kurun waktu 20 tahun ini sepanjang 46,5 Km. Sedangkan penanganan khusus selanjutnya dalam master plan adalah dilakukannya normalisasi bendungan lempake sebanyak 200.000 m³. Program-program tersebut membutuhkan komunikasi kebijakan kepada semua pemangku kepentingan/stakeholder. Oleh karenanya diperlukan strategi komunikasi yang baik untuk dapat mengkomunikasikan semuanya.

Sebagaimana langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan implementasi kebijakan model Edward III khususnya pada aspek komunikasi dilakukan melalui tahap transmisi komunikasi dengan tujuan agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, namun dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan ini, media komunikasi modern juga telah digunakan untuk semakin menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam kebijakan tersebut seperti media elektronik dan media sosial (instagram dan facebook) yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Samarinda. Kemudian pada dimensi kejelasan (*clarity*) tujuan yang ingin dicapai yaitu agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang langsung dipimpin oleh Walikota Samarinda dalam melakukan koordinasi serta evaluasi terhadap capaian yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir Kota Samarinda atau yang biasa disebut sebagai target grup dalam implementasi kebijakan hal ini ditujukan agar mereka dapat memahami yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan. Maksud utama dari komunikasi adalah agar masing-masing aktor kebijakan dapat mengetahui apa yang harus direncanakan sampai dengan bagaimana melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Kegagalan dalam komunikasi kebijakan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Silmi, Nur and Purwanti (2019) berdampak pada tidak efektifnya kebijakan pengendalian bencana yang dilakukan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Silmi, Nur and Purwanti (2019) kurang *updatenya* informasi akan dapat menghambat implementasi kebijakan. Atas kedua temua penelitian tersebut dapat dijadikan pelajaran penting bagi pengambil kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin. Namun berbeda dengan temuan penelitian ini, bahwa Pemerintah Kota Samarinda saat ini telah melakukan komunikasi kebijakan dengan baik melalui Diskominfo untuk membangun meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam

kebijakan melalui berbagai kanal media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Sumberdaya

Salah satu aspek penting dalam implementasi menurut Edward III adalah sumberdaya, yang terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda. Pemerintah Kota telah mempersiapkan sumberdayanya dengan baik, hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia yang melibatkan sebagian besar OPD, Dinas dan Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai salah sumberdaya yang paling penting dalam optimalisasi setiap pencapaian tujuan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Sementara itu untuk sumberdaya keuangan masih sangat terbatas, hal ini menurut Edward III dengan terbatasnya anggaran akan dapat menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Selain itu terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Berangkat dari pandangan tersebut, dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir Kota Samarinda juga akan dapat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Sebagaimana penyajian data sebelumnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Samarinda saat ini memang belum memadai untuk mempercepat program sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda. Besarnya anggaran yang diperlukan memang tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Namun untuk sumberdaya peralatan dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir Kota Samarinda telah cukup memadai sebagaimana data yang telah tersaji sebelumnya bahwa semua komponen telah dibelaki sumberdaya peralatan yang dapat memberikan kontribusi pada saat terjadi bencana alam atau bencana banjir jika terjadi di Kota Samarinda.

Terakhir adalah sumberdaya kewenangan dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir kota samarinda juga sudah baik sebagaimana penyajian data sebelumnya. Menurut salah satu kunci sukses dalam suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Sebagaimana pendapat Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa : “pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya”. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Walikota Samarinda sebagai komando jika terjadi bencana, sementara OPD dan badan-badan yang terkait dengan kewenangan mereka secara otomatis akan menjalankan fungsinya jika terjadi bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan telah dioptimalkan namun masih terkendala pada sumberdaya keuangan.

Disposisi

Secara umum disposisi dimaknai sebagai keinginan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk menuju sukses dalam setiap tindakan. Selaras dengan hal tersebut dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir Kota Samarinda, kemauan, keinginan dan kecenderungan implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dilakukan secara sungguh-sungguh mulai dari peran Walikota sampai dengan telah tersusunya rencana aksi pencegahan dan penanggulangan paska kejadian opsi rencana aksi pencegahan dibagi dalam 2 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah/Panjang. Sebagaimana pendapat Edward III bahwa kesungguhan tersebut merupakan langkah dalam menuju sukses sehingga kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari semua stakeholder/aktor kebijakan.

Jika ditinjau dari faktor pendukung bahwa implementasi ini telah didukung oleh berbagai pihak khususnya sebagian masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Karang Mumus, Pemerintah Provinsi dan bahkan Pemerintah Pusat. Saat ini Pemerintah Kota Samarinda lebih berfokus pada rencana aksi dan ketersediaan anggaran. Kemajuan dalam pengendalian bencana banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda semakin membuahkan hasil dan tampak semakin lama semakin menuju arah yang dikehendaki, sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya bahwa persentase kawasan banjir Kota Samarinda sebesar 1,12% di tahun 2017 sekarang sudah semakin mengecil yaitu sebesar 0,94% pada tahun 2021, begitu juga dengan titik banjir yang semakin berkurang yaitu dari 41 titik pada tahun 2017 menjadi 32 titik pada tahun 2021. Hal ini menandakan keseriusan dan komitmen yang telah dikerjakan dan dengan dukungan semua pihak terhadap bencana alam khususnya banjir telah memberikan kemajuan. Alokasi anggaran yang telah dialokasikan tiap tahunnya dalam APBD dapat berguna dan dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana penetapan tujuan dalam RPJMD Kota Samarinda yaitu “Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni”. Ruang kota yang layak huni yang disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda diarahkan kepada penyediaan gambaran fisik kota yang representatif sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menempatinya. Arah kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda sejalan dengan sasaran dari Misi 3 ini adalah meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan beberapa indikator penunjang diantaranya yang terkait dengan kebijakan ini adalah persentase luas daerah masih tergenang dan persentase penanganan bencana.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dari Misi 3 RPJMD Kota Samarinda yang telah ditetapkan. Berdasarkan data sebelumnya atas capaian pengurangan luas dan titik banjir terlihat bahwa kinerja program pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Samarinda.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda dengan struktur organisasi yang dipimpin langsung oleh Walikota Samarinda dengan melibatkan beberapa OPD (PUPR, BNPB, Bappeda, DLH, Satpol PP dan Kominfo) yang melekat dalam tupoksi yang telah ditugaskan, selain itu juga keterlibatan aktor diluar Pemerintah Daerah banyak berperan terutama dalam penanganan pada saat terjadinya bencana seperti unsur TNI (KODIM), Polri, RAPI, ORARI, PMI dan SENKOM.

Sinergi antara unit-unit dalam komponen struktur yang dibentuk menggambarkan kolaborasi yang telah terbentuk dengan kesadaran yang tinggi dalam rangka saling membantu ketika terjadi bencana. Mekanisme kerja yang mereka jalankan ada dalam SOP yang telah disusun oleh BPBD dan dituangkan dalam Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Kota Samarinda. Adanya SOP dalam melakukan tindakan ketika terjadi bencana dalam SOP tersebut juga kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda, dengan peran yang berbeda. Peran dan tanggungjawab OPD juga telah melekat dengan unit masing-masing ketika terjadi bencana. Secara khusus terus diperbaharui untuk dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan hal tersebut bahwa SOP yang telah dibuat merupakan tuntutan dari bencana yang dihadapi saat ini memang membutuhkan Kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Winarno (2007) yang menyatakan bahwa SOP merupakan tuntutan internal dan memberikan kepastian waktu, sumberdaya yang digunakan serta penyeragaman kerja yang kompleks.

Faktor Penghambat Dan Pendukung

Keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah implementasi, faktor dukungan dari masyarakat adalah yang utama. Tidak terlepas dari kondisi tersebut, dalam implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda. Faktor penghambat yaitu adanya hambatan territorial, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah sekitarnya yang memiliki kewenangan yang berbeda, termasuk juga soal strategi yang berbeda antar wilayah dalam pengendalian banjir di wilayahnya. Selain itu juga skema pembiayaan yang berbeda antar daerah. Oleh sebab itu, kondisi itu juga akan dapat menghambat tujuan – tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu faktor penghambat lain yang terjadi dengan Kota Samarinda adalah keterbatasan lahan pada beberapa wilayah untuk membangun kolam retensi. Walaupun upaya membangun kolam retensi di beberapa titik, namun keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota menjadi tantangan sendiri dalam penyelesaiannya.

Kemudian yang terakhir adalah faktor keuangan yang belum memadai dalam melakukan percepatan penanggulangan banjir. Walaupun dalam perencanaan telah tertuang dalam RPJMD dan rencana aksi, namun ketika adanya keterbatasan pendanaan tentunya juga akan menghambat dalam implementasinya. Sementara itu untuk faktor pengukung adalah telah adanya dukungan dari masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga

dapat semakin membukakan jalan dan langkah maju dalam rangka melakukan normalisasi sungai yang menjadi penyebab utama banjir di Kota Samarinda.

Penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai pada aspek komunikasi yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik, pemanfaatan sosial media sebagai mediator dalam penyampaian pesan telah dilakukan dengan baik oleh Diskominfo Kota Samarinda. Temuan penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Hutomo F (2017) yang berjudul Kajian Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo). Hasil penelitian menunjukkan aspek komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana termasuk dalam kategori baik. Obyek dari penelitian ini sama dengan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu bencana banjir. Hal ini menggambarkan bahwa aspek komunikasi adalah hal yang pertama dilakukan bagi implementor kebijakan dalam sebuah implementasi. Gagalnya membangun komunikasi melalui sosialisasi ditemukan dalam penelitian Silmi, Nur and Purwanti, (2019) bahwa sosialisasi masih kurang dan merata akan berdampak terhadap efektivitas dari kebijakan yang di implementasikan.

Begitu juga dengan hasil penelitian pada aspek sumberdaya apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Hutomo F (2017) secara umum pada aspek sumberdaya menunjukkan hasil yang bervariasi antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Aspek disposisi termasuk dalam kategori baik. Sementara pada penelitian ini semua kategori dari aspek sumberdaya sudah baik namun pada kategori keuangan ditemukan masih mengalami kendala. Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, ROMPAS and DENGGO (2021) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil). Hasil penelitian yang ditemukan bahwa kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sedangkan yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah pada aspek upaya pencegahan dilakukan secara berkesinambungan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai sebagai bentuk pengendalian banjir di Kecamatan Singkil. Begitu juga dengan penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah melakukan normalisasi sungai serta membangun kolam retensi disemua Kecamatan kecuali Kecamatan Sungai Kunjang. Hal ini menggambarkan bahwa karakteristik wilayah mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan terhadap bencana banjir, namun konsistensi dalam perencanaan yang baik telah dilakukan oleh kedua daerah tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi Kebijakan Antisipasi Dan Penanganan Banjir Kota Samarinda pada aspek telah dilakukan dengan baik dan dipahami oleh semua komponen serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Untuk aspek sumberdaya dalam implementasi kebijakan telah dilaksanakan secara maksimal namun masih terkendala pada sumberdaya keuangan

yang terbatas. Kemudian untuk aspek disposisi yang dilakukan oleh aktor utama telah dilakukan dengan baik dan menjadi modal serta adanya dukungan dari semua stakeholder/actor kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Kota Samarinda. Kemudian untuk aspek struktur organisasi telah dibentuk berdasarkan peran masing-masing, SOP dalam penanggulangan juga telah dibuat ketika terjadi bencana. Penguatan peran dan tanggungjawab OPD juga telah melekat dengan unit masing-masing ketika terjadi bencana. Sementara itu, untuk faktor penghambat yaitu adanya hambatan territorial, keterbatasan lahan pada beberapa wilayah untuk membangun kolam retensi. Faktor pendanaan/keuangan yang belum memadai dalam melakukan percepatan penanggulangan banjir dan faktor pengukung adalah telah adanya dukungan dari masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.E. (1979) *'Public Policy Making Holt'*, Rinehart and Weston, NewYork [Preprint].
- Balai-PPW-Kaltim, U. (2020) *Penanganan Dampak Banjir di Kota Samarinda*, pu.go.id. Available at: <https://pu.go.id/berita/penanganan-dampak-banjir-di-kota-samarinda>.
- BPS, K.S. (2021) *Hasil Sensus Penduduk 2020*, Badan Pusat Statistik. Available at: <https://samarindakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/101/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, D.P. dan I. (2009) *'Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia'*, Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia [Preprint]. Available at: https://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf.
- Edward III, G.C. (1980) *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hoogerwerf, A. (1983) *'Ilmu pemerintahan'*. Erlangga.
- Hutomo F, A. (2017) *Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo). Jember*. Available at: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79570>.
- KalimantanTV (2021) *'Keluhan Warga Soal Banjir Kepada DPRD Samarinda'*, <https://www.kalimantantv.com/>. Available at: <https://www.kalimantantv.com/keluhan-warga-soal-banjir-kepada-dprd-samarinda/>.
- Lineberry, R.L. (1978) *'American Public Policy, Harpen Z'*, Row, New York [Preprint].
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1975) *'The policy implementation process: A conceptual framework'*, *Administration & Society*, 6(4), pp. 445–488.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *'Qualitative data analysis: A methods sourcebook'*.

- Mym, P. (2019) '*Bertahun-tahun Banjir di Samarinda, Peran Pemprov dan Pemkot Dipertanyakan*', Prokal.co. Available at: <https://kaltim.prokal.co/read/news/357134-bertahun-tahun-banjir-di-samarinda-peran-pemprov-dan-pemkot-dipertanyakan.html>.
- Parsons, M.D. (1997) *Power and politics: Federal higher education policymaking in the 1990s*. SUNY Press.
- Purwanto, P. (2020) '*Analisis Sistem Pengendalian Banjir Sungai Pampang Daerah Aliran Hulu Sungai Karangmumus*', Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, 3(2), pp. 44–58.
- Rahayu, I.P., ROMPAS, W. and DENGO, S. (2021) '*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil)*', JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 7(105).
- Sabatier (1993) '*Advocacy-Koalitionen, Policy-Wandel und Policy-Lernen: Eine Alternative zur Phasenheuristik*', in *Policy-Analyse*. Springer, pp. 116–148.
- Sabatier, P. and Mazmanian, D. (1993) '*La implementación de la política pública: un marco de análisis*', *La implementación de las políticas*, pp. 323–372.
- Samarinda, P.K. (2021) '*RPJMD 2021-2026*'. Samarinda: PPID, Pemerintah Kota Samarinda. Available at: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/rpjp-rpjud-dan-rkpd>.
- Silmi, N.R., Nur, T. and Purwanti, D. (2019) '*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Sukabumi*', JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 1(1), pp. 30–40.
- Sukandar (2017) *Koordinasi Pengendalian Banjir Kota Samarinda*, bappeda.kaltimprov.go.id. Available at: <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/koordinasi-pengendalian-banjir-kota-samarinda>.
- Sunggono, B., *Lingkungan, H. and Kependudukan, D.* (1994) '*Hukum dan Kebijaksanaan Publik*', sinar Grafika'. Jakarta.
- Wahab (1997) '*Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*', Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara [Preprint].
- Walikota (2018) '*Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Masterplan Samarinda Smart City*'. Samarinda: PPID.
- Whitford, A.B. (2007) '*Decentralized policy implementation*', *Political Research Quarterly*, 60(1), pp. 17–30.
- Widodo, J. (2010) '*Analisis kebijakan publik*', Malang: Bayumedia [Preprint].
- Winarno, B. (2002) *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2007) *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).